



## Diskursus Publik dan Relevansi Dengan Legitimasi Kekuasaan Dari Teori Habermas

Zakiyah<sup>1</sup> Raisa Agnia<sup>2</sup> Hani Sri handayani<sup>3</sup> Zahra Davika<sup>4</sup> Ahmad Ramdani<sup>5</sup> M.Z Syafiq<sup>6</sup>

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

zakiyahnasution26@gmail.com, raisaagniaa4@gmail.com, srihandayanihani2@gmail.com, zahravadikaa@gmail.com,

ahmadramadaniiii112@gmail.com, haidarsukses847478@gmail.com

### RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2024-07-02

Revised : 2024-07-05

Accepted: 2024-07-05

### KEYWORD

Discourse; Public area;

Legitimacy of Power

### KATA KUNCI

Diskursus; Ruang Publik;

Legitimasi Kekuasaan

### ABSTRACT

*Research on Jürgen Habermas's theory of public discourse and its relevance to the legitimacy of power has deep significance in the fields of political science and communication (Muhammad Ersyad Muttaqien, 2023). Habermas' theory emphasizes the importance of rational communication in the public sphere as a foundation for the legitimacy of political power. This research uses a literature or literature study approach to explore Jürgen Habermas' theory of public discourse and its relevance to the legitimacy of power. This method was chosen because it allows researchers to in-depth review relevant literature, including books, journal articles, and papers that discuss Habermas' theory and its application in the context of the legitimacy of power. Overall, the ideas about public space and discourse according to Jürgen Habermas have an impact on how power is legitimized. formed, by providing opportunities for citizens to participate in decision making and understand government policies. Through public discourse, opportunities open up to reach decisions that are more based on rational thinking and take into account the interests of all parties, which in turn increases the legitimacy of power. That Habermas' theory of public discourse legitimizes power obtained through a rational and inclusive communication process. In its practical context, this theory invites to open a space for public discussion that is free from domination and manipulation, so that every individual has the same opportunity to participate. Overall, Habermas's theory provides a strong foundation for building a more just and sustainable society through transparent and inclusive communication.*

### ABSTRAK

Penelitian mengenai teori diskursus publik Jürgen Habermas dan relevansinya dengan legitimasi kekuasaan memiliki signifikansi yang mendalam dalam bidang ilmu politik dan komunikasi. Teori Habermas menekankan pentingnya komunikasi rasional dalam ruang publik sebagai fondasi bagi legitimasi kekuasaan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur atau pustaka untuk mendalami teori diskursus publik dari Jürgen Habermas dan relevansinya dengan legitimasi kekuasaan. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk secara mendalam mengkaji literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, dan makalah yang membahas teori Habermas serta penerapannya dalam konteks legitimasi kekuasaan. Secara keseluruhan, gagasan tentang ruang publik dan diskursus menurut Jürgen Habermas berdampak pada bagaimana legitimasi kekuasaan terbentuk, dengan memberikan peluang bagi warga negara untuk turut serta dalam pembuatan keputusan dan memahami kebijakan pemerintah. Melalui diskursus publik, terbuka peluang untuk mencapai keputusan yang lebih berdasarkan pada

pemikiran rasional dan memperhatikan kepentingan semua pihak, yang pada gilirannya meningkatkan legitimasi kekuasaan. Bahwa teori diskursus publik Habermas melegitimasi kekuasaan yang diperoleh melalui proses komunikasi yang rasional dan inklusif. Dalam konteks praktiknya, teori ini mengajak untuk membuka ruang diskusi publik yang bebas dari dominasi dan manipulasi, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Keseluruhannya, teori Habermas memberikan landasan yang kuat untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan melalui komunikasi yang transparan dan inklusif.

## 1. Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan demokratisasi, peran diskursus publik dalam legitimasi kekuasaan menjadi sangat penting. Diskursus publik, yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas, adalah suatu proses komunikasi yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mempengaruhi kebijakan (Simanungkalit, 2014). Dalam konteks ini, penelitian ini akan membahas teori Habermas tentang diskursus publik dan relevansinya dengan legitimasi kekuasaan. Dalam era modern, kekuasaan tidak lagi ditentukan oleh tradisi dan otoritas, melainkan oleh proses demokratis yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Diskursus publik adalah suatu proses yang memungkinkan masyarakat untuk berdiskusi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga mempengaruhi legitimasi kekuasaan (Noor, 2012). Dalam konteks ini, penelitian ini penting karena membantu memahami bagaimana diskursus publik mempengaruhi legitimasi kekuasaan dan bagaimana kekuasaan dapat dipertahankan melalui proses demokratis.

Masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana diskursus publik mempengaruhi legitimasi kekuasaan. Dalam era modern, kekuasaan tidak lagi ditentukan oleh tradisi dan otoritas, melainkan oleh proses demokratis yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas bagaimana diskursus publik mempengaruhi legitimasi kekuasaan dan bagaimana kekuasaan dapat dipertahankan melalui proses demokratis. Jürgen Habermas, seorang filsuf Jerman, mengemukakan teori tentang diskursus publik yang mempengaruhi legitimasi kekuasaan (Tobing, 2017). Menurut Habermas, diskursus publik adalah suatu proses komunikasi yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mempengaruhi kebijakan. Dalam teori ini, Habermas menjelaskan

bahwa diskursus publik memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mempengaruhi kebijakan, sehingga mempengaruhi legitimasi kekuasaan.

Dalam teori Habermas, diskursus publik terdiri dari tiga komponen utama: komunikasi, partisipasi, dan konsensus. Komunikasi adalah proses berbagi informasi dan ide antara individu dan kelompok. Partisipasi adalah proses berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mempengaruhi kebijakan (Prasetyo, 2012). Konsensus adalah hasil dari proses komunikasi dan partisipasi, di mana masyarakat mencapai kesepakatan dan mempengaruhi kebijakan. Dalam konteks ini, penelitian ini akan membahas bagaimana diskursus publik mempengaruhi legitimasi kekuasaan dan bagaimana kekuasaan dapat dipertahankan melalui proses demokratis. Oleh karena itu, penelitian ini penting karena membantu memahami bagaimana diskursus publik mempengaruhi legitimasi kekuasaan dan bagaimana kekuasaan dapat dipertahankan melalui proses demokratis.

Penulisan penelitian ini akan coba penulis kaitkan dengan beberapa karya ilmiah terdahulu, sehingga akan didapatkan keterkaitan dengan karya ilmiah di atas. Adapun karya ilmiah yang penulis maksud adalah sebagai berikut: Buku yang ditulis oleh Budi Hardiman, F dengan judul *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas* ini membahas pemikiran Habermas tentang sirkulasi deliberasi politis dari kelompok-kelompok masyarakat sipil dalam ruang publik menuju sistem politik. Termasuk pula pembahasan mengenai problem agama dalam ruang publik dan gerakan-gerakan. Adapun hasil dari penelitian buku ini ialah memastikan pendiriannya, penulis menempatkan Teori Diskursus dalam konstelasi perdebatan antara liberalisme dan komunitarianisme di dalam filsafat politik kontemporer dan secara kritis memeriksa asumsi-asumsi Habermas untuk membuka diskusi lebih lanjut (Hardiman, 2010).

Adapun dasar teori yang mendukung artikel tentang teori diskursus publik oleh Jürgen Habermas dan relevansinya dengan legitimasi kekuasaan melibatkan beberapa konsep kunci (Tobing, 2017): Pertama Ruang Publik (Public Sphere) yang mana konsep ruang publik adalah landasan utama dalam teori diskursus Habermas. Ruang publik adalah tempat di mana masyarakat berdiskusi, mengkritik, dan membangun opini secara kritis. Dalam demokrasi deliberatif, ruang publik memainkan peran penting dalam menyuarakan sikap dan argumen terhadap negara atau pemerintah. Kedua, Demokrasi Deliberatif yaitu Habermas memandang bahwa kebijakan publik harus melalui proses diskursif dan konsultasi publik. Demokrasi deliberatif memungkinkan partisipasi aktif warga negara dalam pembentukan kebijakan melalui dialog dan diskusi. Ketiga, Konsensus dan Kesepakatan Bersama yaitu teori diskursus Habermas menekankan pentingnya mencapai konsensus melalui proses diskusi rasional. Konsensus yang dicapai melalui diskursus publik memberikan dasar legitimasi bagi kebijakan publik.

Relevansi diskursus publik Habermas terhadap legitimasi kekuasaan yaitu Teori diskursus publik Jürgen Habermas menyoroti pentingnya ruang publik sebagai tempat di mana warga dapat berpartisipasi dalam diskusi rasional untuk mencapai pemahaman bersama. Dalam konteks demokrasi, konsep ini menjadi krusial dalam membentuk opini publik yang kuat dan mendukung legitimasi kekuasaan berbasis dialog dan argumentasi yang masuk akal (Habermas, 2023).

Penelitian yang menganalisis teori diskursus publik Habermas menunjukkan relevansinya dalam memperkuat demokrasi dan menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat. Diskusi yang terbuka dan inklusif di ruang publik dapat memperkuat legitimasi kekuasaan dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis (Wisnu, 2014).

Habermas menekankan bahwa legitimasi kekuasaan bukan hanya berasal dari struktur formal, tetapi juga dari kualitas argumentasi dan kesepakatan yang dicapai dalam diskursus publik (Hardiman, 2010). Oleh karena itu, penelitian yang menggali teori diskursus publik Habermas memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana proses komunikasi publik dapat memperkuat legitimasi kekuasaan secara demokratis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori diskursus publik dari Jürgen Habermas dan mengevaluasi relevansinya terhadap legitimasi

kekuasaan dalam konteks politik modern. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah: Mengidentifikasi dan menjelaskan konsep-konsep utama dalam teori diskursus publik Habermas. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dicapai pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran diskursus publik dalam proses legitimasi kekuasaan, serta memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas diskursus publik sebagai sarana legitimasi kekuasaan yang lebih adil dan efektif (Sudrajat, 2019). Penelitian ini juga akan menjawab pertanyaan bagaimana cara konsep ruang publik dapat mempengaruhi legitimasi kekuasaan? Dan bagaimana contoh dari gerakan sosial kontemporer yang berhasil dan gagal?.

Penelitian mengenai teori diskursus publik Jürgen Habermas dan relevansinya dengan legitimasi kekuasaan memiliki signifikansi yang mendalam dalam bidang ilmu politik dan komunikasi (Muhammad Ersyad Muttaqien, 2023). Teori Habermas menekankan pentingnya komunikasi rasional dalam ruang publik sebagai fondasi bagi legitimasi kekuasaan politik. Dengan mengeksplorasi konsep ini, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami bagaimana proses komunikasi yang inklusif dan terbuka dapat memperkuat legitimasi pemerintahan. Lebih jauh, hasil penelitian ini juga dapat menawarkan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dan pemimpin politik dalam merancang mekanisme partisipasi publik yang lebih efektif dan demokratis. Secara praktis, penelitian ini dapat mendorong implementasi kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan memperkuat stabilitas sosial-politik.

Penelitian akan membatasi analisis pada konsep diskursus publik menurut Habermas. Aspek-aspek lain dari teori Habermas, seperti teori tindakan komunikatif, mungkin tidak termasuk dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini akan memeriksa bagaimana diskursus publik berkontribusi pada legitimasi kekuasaan. Namun, penelitian ini tidak akan membahas secara mendalam konsep legitimasi kekuasaan di luar konteks diskursus publik (Asy'ari Muthhar, 2016).

## 2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur atau pustaka untuk mendalami teori diskursus publik dari Jürgen Habermas dan relevansinya dengan legitimasi kekuasaan. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk secara mendalam mengkaji literatur yang relevan,

termasuk buku, artikel jurnal, dan makalah yang membahas teori Habermas serta penerapannya dalam konteks legitimasi kekuasaan. Langkah pertama dalam metodologi ini adalah pengumpulan literatur yang relevan. Peneliti akan menggunakan database akademik seperti Google Scholar, untuk mengidentifikasi sumber-sumber utama dan sekunder yang membahas teori diskursus publik Habermas. Selain itu, peneliti juga akan mencari literatur yang mengkaji kasus-kasus empiris di mana teori ini diterapkan untuk menganalisis legitimasi kekuasaan. Setelah literatur terkumpul, langkah berikutnya adalah analisis isi. Peneliti akan melakukan analisis teks terhadap literatur yang terpilih untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci dari teori Habermas, termasuk konsep-konsep seperti ruang publik, partisipasi warga, dan konsensus rasional. Peneliti juga akan menganalisis bagaimana teori ini diaplikasikan dalam studi-studi kasus yang relevan, dengan fokus pada mekanisme bagaimana diskursus publik mempengaruhi legitimasi kekuasaan. Melalui pendekatan studi literatur ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan kritis mengenai kontribusi teori diskursus publik Habermas terhadap pemahaman tentang legitimasi kekuasaan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Pemikiran Habermas tentang rasionalitas komunikatif dan ruang publik menyatakan bahwa komunikasi yang rasional dan kritis dalam ruang publik sangat penting untuk mencapai konsensus dan legitimasi dalam masyarakat (Habermas, 1979). Menurutnya, diskursus yang bebas dan terbuka memainkan peran penting dalam membentuk keputusan yang berkualitas dan mempengaruhi struktur kekuasaan. Habermas menekankan partisipasi publik dalam proses pembuatan keputusan sebagai fondasi demokrasi deliberative (Habermas, 2007). Jadi, esensinya adalah bahwa komunikasi yang terbuka dan kritis dalam ruang publik adalah kunci untuk mencapai kesepakatan dan legitimasi dalam masyarakat.

Diskursus adalah sebuah proses diskusi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan melalui argumen-argumen partisipan yang berkomunikasi. Namun, konsensus yang tercapai dalam diskursus bersifat sementara, karena informasi baru di masa mendatang dapat mengubah konsensus yang sudah ada (Prasetyo, 2012). Oleh karena itu, proses diskursus perlu dilakukan kembali secara terus-menerus. Habermas juga menerapkan konsep diskursus dalam wilayah politik melalui teori

demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif adalah demokrasi di mana legitimasi hukum tercapai melalui diskursus dalam masyarakat sipil. Dalam demokrasi deliberatif, keputusan politik tidak diambil dalam ketertutupan, melainkan melalui proses diskursus yang argumentatif (Muzaqqi, 2019). Dengan demikian, diskursus masyarakat dapat mengarahkan keputusan-keputusan politik tanpa menguasai sistem politik.

Ruang publik yaitu "keadaan yang dapat diakses oleh semua orang". Istilah ini menunjukkan bahwa ruang publik tidak bersifat tunggal, tetapi terbuka dan dapat diakses oleh semua orang. Ruang publik hadir di mana-mana, dengan jumlah orang yang tidak terbatas. Ruang dimana masyarakat berkumpul bersama untuk menjadi publik dan tempat di mana ide, informasi, dan pandangan setiap orang dapat disampaikan dan dipertukarkan. Tujuan utama dari ruang publik adalah untuk mengatasi perbedaan dalam berbagai kepentingan dengan mencapai konsensus yang sama melalui diskursus (Hantono & Ariantantrie, 2018). Ruang publik bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga bisa berupa ruang komunikasi virtual atau digital. Ruang publik terbagi menjadi dua jenis (Hasan, 2019):

- 1) Ruang Publik Formal terjadi di lembaga-lembaga negara seperti parlemen, peradilan, dan institusi pemerintahan lainnya.
- 2) Ruang Publik Informal terjadi di wilayah non-pemerintahan seperti media sosial, surat kabar, warung kopi, dan tempat-tempat lain di mana orang berkumpul untuk berdiskusi.

Diskursus dalam ruang publik tidak hanya sebatas mengidentifikasi masalah, tetapi juga mencakup pemikiran, penawaran solusi, dan upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Opini publik yang terbentuk dalam ruang publik informal diharapkan dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah. Dengan demikian, opini publik bertindak sebagai pengawas terhadap kekuasaan negara. Ketika hasil diskursus dalam ruang publik informal diintegrasikan ke dalam proses pembuatan keputusan pemerintah, hukum yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan kedaulatan rakyat semakin terwujud.

#### a. Pengaruh Konsep Ruang Publik terhadap Legitimasi Kewenangan dalam Demokrasi Deliberatif

Jürgen Habermas mengemukakan konsep ruang publik dengan memfokuskan pada rasio komunikatifnya sebagai perspektif utama. Dalam menghadapi kebuntuan generasi pertama Mazhab

Frankfurt, yang menyoroiti teknokratisme sebagai irasionalitas, Habermas memperkenalkan paradigma tindakan komunikatif. Dia menganggap praktek diskursus dalam masyarakat sipil sebagai kunci untuk memberikan legitimasi pada hukum dalam konteks politik dan hukum. Teori tindakan komunikatif menjadi landasan pemikirannya yang tetap dipertahankan. Teori diskursus menjadi dasar bagi konsep ruang publik menurut Habermas. Ruang publik menjadi tempat di mana asosiasi sukarela terbentuk melalui perdebatan yang rasional dan kritis, yang membentuk integrasi sosial yang inter-subjektif (Setiawan, 2015). Habermas menekankan pentingnya wilayah dunia kehidupan sebagai latar belakang untuk solidaritas sosial, tanpa ketergantungan pada sistem dan birokrasi.

Habermas membagi rasionalitas menjadi tiga jenis, yaitu rasionalitas tindakan bertujuan, rasionalitas strategis, dan rasionalitas komunikatif. Dia menyadari bahwa krisis modernitas disebabkan oleh ketimpangan rasionalitas yang mempengaruhi kesadaran masyarakat. Untuk mengatasi krisis tersebut, integrasi sosial harus diperkuat melalui perbincangan rasional yang mengatasi dominasi. Agama, sebagai sistem nilai, dapat mendorong solidaritas dalam masyarakat dan berperan dalam pembentukan ruang publik yang bebas dan independen (Fauzan, 2018). Dorongan religius yang tepat bisa menjadi pendukung bagi eksistensi ruang publik yang berlangsung.

Dalam konteks legitimasi kekuasaan, ruang publik memiliki peran yang sangat penting dalam memengaruhi bagaimana kekuasaan dianggap sah. Ruang publik menjadi tempat di mana warga negara bisa terlibat dalam diskusi dan perdebatan yang berbasis pada pemikiran yang rasional dan kritis. Hal ini memungkinkan mereka untuk memahami dan menilai kebijakan serta tindakan pemerintah. Dalam teori aksi komunikatifnya, Habermas memperkenalkan gagasan "diskursus" sebagai cara untuk memahami bagaimana keputusan dibuat dan legitimasi kekuasaan diperoleh. Diskursus ini merupakan proses perdebatan yang berlangsung secara rasional dan kritis, yang melibatkan semua pihak yang terpengaruh oleh keputusan tersebut. Di dalam diskursus, argumen-argumen dan informasi disajikan, diperdebatkan, dan dipertanyakan, sehingga memungkinkan tercapainya keputusan yang lebih rasional dan yang memperhitungkan kepentingan semua pihak (Jurgen Habermas, 1984).

Dalam diskursus demokrasi deliberatif, konsep ruang publik memainkan peran penting dalam

mempengaruhi legitimasi kewenangan. Berikut beberapa caranya:

1) Memfasilitasi Deliberasi dan Pertukaran Gagasan:

Ruang publik menyediakan wadah bagi warga negara untuk bertukar pikiran, berdebat, dan mencapai kesepakatan tentang isu-isu publik. Melalui proses deliberasi ini, mereka dapat secara rasional dan kritis mengevaluasi argumen dan kebijakan yang diajukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Demokrasi deliberatif menekankan pentingnya partisipasi aktif dan inklusif dari semua pihak dalam proses deliberasi. Hal ini memastikan bahwa berbagai perspektif dan kepentingan terwakili dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Ketika ruang publik berfungsi dengan baik, ia dapat menghasilkan keputusan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel, yang pada gilirannya meningkatkan legitimasi kewenangan (Dryzek, 2000).

2) Meningkatkan Akuntabilitas dan Kontrol Publik:

Ruang publik yang sehat memungkinkan warga negara untuk mengawasi dan mengkritik tindakan pemerintah. Melalui media massa, aktivisme masyarakat sipil, dan protes publik, mereka dapat menyuarakan ketidaksetujuan dan menuntut pertanggungjawaban dari para pemimpin. Kemampuan untuk mengawasi dan mengkritik ini membantu memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan publik dan bukan hanya kepentingan elit tertentu. Ketika kewenangan pemerintah tunduk pada kontrol publik yang ketat, legitimasinya pun semakin kuat (Bohman, J., & Reith, 2001).

3) Membangun Konsensus dan Kepercayaan:

Proses deliberasi yang berlangsung di ruang publik dapat membantu membangun konsensus dan kepercayaan di antara warga negara. Ketika mereka terlibat dalam pertukaran gagasan yang terbuka dan hormat, mereka dapat lebih memahami sudut pandang orang lain dan menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Konsensus dan kepercayaan ini sangat penting untuk legitimasi kewenangan. Ketika warga negara merasa bahwa suara mereka didengar dan kepentingannya dipertimbangkan, mereka lebih cenderung menerima dan mematuhi keputusan yang diambil oleh pemerintah.

- 4) Mempromosikan Legitimasi Normatif: Demokrasi deliberatif tidak hanya berfokus pada pengambilan keputusan yang efisien, tetapi juga pada pengembangan norma dan nilai yang adil dan berkelanjutan. Ruang publik menyediakan tempat bagi warga negara untuk mendiskusikan dan menyepakati prinsip-prinsip moral dan etika yang harus mendasari kebijakan publik. Ketika kewenangan pemerintah didasarkan pada norma dan nilai yang disepakati bersama, ia memperoleh legitimasi normatif. Hal ini berarti bahwa warga negara mematuhi otoritas bukan karena takut akan paksaan, tetapi karena mereka percaya bahwa otoritas tersebut bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang mereka junjung tinggi (Jurgen Habermas, 1989).
- 5) Memperkuat Demokrasi dan Keadilan Sosial: Secara keseluruhan, konsep ruang publik dalam demokrasi deliberatif berkontribusi pada legitimasi kewenangan dengan memperkuat demokrasi dan mempromosikan keadilan sosial. Ketika warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan, mereka merasa lebih memiliki andil dalam masyarakat dan lebih percaya pada sistem politik. Selain itu, proses deliberasi dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat, yang pada gilirannya menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif bagi semua (Fung, A., & Olin, 2006).

Penting untuk dicatat bahwa ruang publik yang ideal tidak selalu mudah untuk dicapai. Ada berbagai faktor yang dapat menghambat fungsinya, seperti dominasi oleh kelompok-kelompok tertentu, kurangnya akses informasi, dan intervensi dari pihak yang berkepentingan. Namun, dengan upaya berkelanjutan untuk mempromosikan partisipasi sipil, transparansi, dan akuntabilitas, ruang publik dapat menjadi alat yang ampuh untuk memperkuat legitimasi kewenangan dalam demokrasi deliberatif dan membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Salah satu contoh gerakan sosial kontemporer yang berhasil meningkatkan legitimasi melalui diskursus publik adalah gerakan perubahan iklim. Contohnya, Greta Thunberg, seorang aktivis lingkungan muda, berhasil menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk ikut berpartisipasi dalam aksi protes dan menyuarkan kebutuhan akan

tindakan nyata untuk mengatasi perubahan iklim. Dengan berbagai macam inisiatif, seperti demonstrasi, kampanye sosial media, dan diskusi publik, gerakan perubahan iklim berhasil menggerakkan masyarakat untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah dan tindakan industri yang merusak lingkungan.

Melalui diskursus publik yang terus-menerus dan melibatkan berbagai pihak dalam diskusi terbuka dan kritis tentang perubahan iklim, gerakan ini telah berhasil menarik perhatian para pemimpin politik dan industri, mendorong mereka untuk mengambil tindakan nyata dalam memerangi perubahan iklim. Kesadaran publik tentang urgensi masalah ini telah meningkat. Gerakan ini berhasil meningkatkan legitimasi dengan membuka ruang publik yang inklusif dan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan terkait perubahan iklim (Archandra Sugama, Brigitta Kalina, 2019).

Secara keseluruhan, gagasan tentang ruang publik dan diskursus menurut Jürgen Habermas berdampak pada bagaimana legitimasi kekuasaan terbentuk, dengan memberikan peluang bagi warga negara untuk turut serta dalam pembuatan keputusan dan memahami kebijakan pemerintah. Melalui diskursus publik, terbuka peluang untuk mencapai keputusan yang lebih berdasarkan pada pemikiran rasional dan memperhatikan kepentingan semua pihak, yang pada gilirannya meningkatkan legitimasi kekuasaan.

## **b. Gerakan Sosial Kontemporer**

Contoh gerakan sosial kontemporer ada dua jenis yakni gerakan sosial kontemporer berhasil dan gerakan sosial tidak berhasil. Contoh dari gerakan sosial kontemporer yang berhasil, yaitu (Jenn Hatfield, 2023):

Gerakan Black Lives Matter (BLM) merupakan contoh nyata bagaimana diskursus publik dapat mempengaruhi legitimasi kekuasaan, sesuai dengan teori Jürgen Habermas. Teori Habermas menekankan pentingnya ruang publik sebagai tempat di mana warga negara dapat berpartisipasi dalam diskusi rasional mengenai isu-isu penting, sehingga membentuk opini publik yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dalam konteks BLM, ruang publik ini melibatkan berbagai platform seperti media sosial, demonstrasi jalanan, dan diskusi komunitas, yang semuanya berkontribusi dalam mengangkat isu ketidakadilan rasial ke tingkat nasional dan internasional.

Gerakan BLM berhasil memobilisasi jutaan orang untuk berbicara tentang kekerasan polisi dan

ketidakadilan sistemik yang dialami oleh komunitas kulit hitam di Amerika Serikat. Melalui diskursus publik ini, BLM tidak hanya meningkatkan kesadaran tentang masalah-masalah ini, tetapi juga memaksa pemerintah dan institusi lain untuk merespons tuntutan masyarakat. Teori Habermas menekankan bahwa legitimasi kekuasaan berasal dari partisipasi aktif warga negara dalam diskursus publik, dan BLM menunjukkan bagaimana kekuatan dari partisipasi ini dapat mengarahkan perubahan sosial yang signifikan.

Selain itu, gerakan BLM telah berhasil mengubah narasi publik dan kebijakan terkait penegakan hukum dan reformasi keadilan. Banyak pemerintah lokal dan negara bagian di AS mulai menerapkan perubahan kebijakan sebagai respons terhadap tuntutan BLM, termasuk reformasi polisi, pelatihan anti-rasisme, dan transparansi yang lebih besar dalam penanganan kasus-kasus kekerasan oleh aparat. Ini menunjukkan bagaimana diskursus publik yang efektif dapat menghasilkan perubahan konkret dalam kebijakan pemerintah, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi kekuasaan dengan menunjukkan responsif dan akuntabilitas kepada warga negara.

BLM juga menunjukkan bagaimana teori Habermas tentang diskursus publik mencakup pentingnya inklusivitas dan partisipasi yang luas. Gerakan ini melibatkan berbagai kelompok masyarakat, dari aktivis hak-hak sipil hingga selebriti, akademisi, dan masyarakat umum, menciptakan dialog yang kaya dan beragam. Inklusivitas ini memastikan bahwa suara dari berbagai latar belakang didengar dan dipertimbangkan, yang memperkuat legitimasi gerakan itu sendiri dan tuntutan yang diajukan.

Akhirnya, keberhasilan BLM dalam memengaruhi diskursus publik dan legitimasi kekuasaan sesuai dengan konsep Habermas tentang demokrasi deliberatif, di mana keputusan yang dihasilkan melalui proses deliberasi yang inklusif dan rasional memiliki legitimasi yang lebih besar. Dengan memfasilitasi dialog publik tentang ketidakadilan rasial dan mendorong perubahan kebijakan, BLM menunjukkan bagaimana diskursus publik dapat menjadi alat yang kuat untuk memperkuat demokrasi dan mempromosikan keadilan sosial.

Adapun contoh gerakan sosial kontemporer yang tidak berhasil (Dias P. S. Mahayasa, 2020):

Gerakan Occupy Wall Street (OWS) termasuk contoh dalam konteks diskursus publik dan relevansinya dengan legitimasi kekuasaan dari perspektif teori Habermas. Meskipun OWS berhasil

menarik perhatian global terhadap ketidaksetaraan ekonomi dan kekuasaan yang tidak seimbang, gerakan ini mengalami kegagalan dalam beberapa aspek yang penting untuk legitimasi dalam demokrasi deliberatif menurut Habermas.

Pertama, teori Habermas menekankan pentingnya ruang publik yang efektif untuk pembentukan opini publik melalui diskursus rasional. OWS menghadirkan ruang publik alternatif di mana orang dapat berdiskusi tentang ketidaksetaraan dan korupsi di sektor keuangan. Namun, gerakan ini sering kali menghadapi tantangan dalam menjaga fokus dan struktur diskursus. Banyak kelompok dan individu dengan berbagai agenda berkumpul di tempat yang sama, yang mengakibatkan terfragmentasinya pesan utama dan melemahnya kemampuan untuk membentuk opini publik yang koheren dan terfokus.

Kedua, menurut Habermas, diskursus publik yang efektif harus dapat mempengaruhi proses legislatif dan pembuatan kebijakan melalui komunikasi rasional. OWS, meskipun menarik perhatian media dan publik, sering kali gagal dalam membangun jembatan yang efektif antara ruang publik dan pembuat kebijakan. Ketidakmampuan untuk menyusun tuntutan konkret dan merumuskan strategi advokasi yang jelas menghambat potensi gerakan ini untuk mempengaruhi perubahan kebijakan secara nyata.

Ketiga, legitimasi dalam teori Habermas diperoleh melalui partisipasi inklusif dan deliberasi yang rasional. Sementara OWS berhasil menarik berbagai partisipan dari latar belakang yang berbeda, gerakan ini juga dihadapkan pada masalah internal seperti kepemimpinan yang tidak terorganisir dan kurangnya struktur yang jelas. Hal ini menghambat proses deliberasi yang efektif dan inklusif, yang pada akhirnya merusak legitimasi gerakan itu sendiri di mata publik dan pembuat kebijakan.

Keempat, Habermas menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan dalam mencapai konsensus dan legitimasi. OWS sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menyampaikan pesan yang konsisten dan mudah dipahami oleh publik luas. Slogan seperti "We are the 99%" memang efektif dalam menarik perhatian, tetapi tidak selalu disertai dengan penjelasan yang mendalam dan rencana tindakan yang konkret, sehingga menyulitkan upaya untuk membangun konsensus yang lebih luas.

Kelima, dalam konteks transparansi dan akuntabilitas, OWS menghadapi tantangan dalam mempertahankan legitimasi internal dan eksternal.

Ketiadaan struktur kepemimpinan formal dan mekanisme pengambilan keputusan yang jelas membuat gerakan ini rentan terhadap kritik dan konflik internal. Selain itu, kurangnya strategi jangka panjang dan visi yang jelas membuat gerakan ini sulit untuk mempertahankan momentum dan mendapatkan dukungan berkelanjutan dari masyarakat luas. Akibatnya, meskipun OWS berhasil menyoroti isu-isu penting, kegagalan dalam memenuhi kriteria diskursus publik yang efektif menurut Habermas menghambat potensinya untuk mencapai perubahan yang diinginkan.

#### 4. Kesimpulan

Bahwa teori diskursus publik Habermas melegitimasi kekuasaan yang diperoleh melalui proses komunikasi yang rasional dan inklusif. Habermas menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan keputusan, yang memungkinkan terbentuknya konsensus yang didasarkan pada argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menegaskan bahwa kekuasaan yang sah harus didasarkan pada persetujuan bersama yang dicapai melalui dialog terbuka dan jujur.

Dalam konteks praktiknya, teori ini mengajak untuk membuka ruang diskusi publik yang bebas dari dominasi dan manipulasi, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Kritik Habermas terhadap kondisi sosial yang menghambat diskursus publik, seperti ketimpangan ekonomi dan kekuasaan yang tidak merata, mendorong kita untuk mengatasi hambatan-hambatan ini demi memperkuat keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan sosial.

Implementasi teori diskursus publik dapat membantu mengevaluasi dan memperbaiki praktik demokrasi di berbagai negara. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip komunikasi yang demokratis, kita dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan publik serta memperbaiki legitimasi kekuasaan dalam konteks modern. Keseluruhannya, teori Habermas memberikan landasan yang kuat untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan melalui komunikasi yang transparan dan inklusif.

#### 5. Daftar pustaka

Archandra Sugama, Brigitta Kalina, dan D. R. R. (2019). Gerakan Fridays for Future. *Foreign Policy Community of Indonesia Chapter UGM*. <https://fpciugm.medium.com>

- Asy'ari Muthhar, M. (2016). Membaca demokrasi deliberatif Jürgen Habermas dalam dinamika politik Indonesia. *USHULUNA, Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 49–72.
- Bohman, J., & Reith, M. (2001). *Public deliberation in the twenty-first century*. MIT Press.
- Dias, P. S. Mahayasa. (2020). Globalisasi dan resistensi: Studi kasus kemunculan gerakan Occupy Wallstreet. *Global and Policy Journal of International*.
- Dryzek, R. (2000). *Deliberative democracy and public policy*. Cambridge University Press.
- Fauzan, M. (2018). Demokrasi rasional Jürgen Habermas: Studi agama dalam ruang publik.
- Fung, A., & Olin, S. (2006). *Deepening democracy: How public deliberation can empower citizens and strengthen community*. Harvard University Press.
- Habermas, J. (1979). *Communication and the evolution of society* (Thomas McCarthy, Trans.). Beacon Press.
- Habermas, J. (2007). *Teori tindakan komunikatif I: Rasio dan rasionalisasi masyarakat* (Alimandan, Trans.). Kreasi Wacana.
- Habermas, J. (2023). Jürgen Habermas. *Stanford Encyclopedia of Philosophy*.
- Hantono, D., & Ariantantrie, N. (2018). Kajian ruang publik dan isu yang berkembang di dalamnya. *Vitruvian*, 8(1), 43. <https://doi.org/10.22441/vitruvian.2018.v8i1.005>
- Hardiman, F. B. (2010). *Demokrasi deliberatif: Menimbang negara hukum dan ruang publik dalam teori diskursus Jürgen Habermas*. Kanisius.
- Hasan, M. F. (2019). Membaca ruang publik dan jurnalisme dalam perspektif Jürgen Habermas. *Perspektif*, 14(1), 1–24. <https://doi.org/10.69621/jpf.v14i1.115>
- Hatfield, J. (2023). 8 facts about Black Lives Matter. *Pew Research Center*. <https://www.pewresearch.org>
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action: Volume I, Reason and rationalization of society* (Thomas McCarthy, Trans.). Beacon Press.
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere*. MIT Press.
- Muhammad Ersyad Muttaqien. (2023). Konsep komunikasi Jürgen Habermas dalam ide demokrasi deliberatif dan tindakan komunikatif. *Ilmu Komunikasi*, 6(1), 51. <http://repository.unpas.ac.id/62090/>

- Muzaqqi, F. (2019). *Diskursus demokrasi deliberatif di Indonesia*. Airlangga University Press.
- Noor, I. (2012). Identitas agama, ruang publik dan post-sekularisme: Perspektif. *Ilmu Ushuluddin*, 11(1), 61–87.
- Prasetyo, A. G. (2012). Menuju demokrasi rasional: Melacak pemikiran Jürgen Habermas tentang ruang publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 16(2), 169–185.
- Setiawan, A. (2015). Konsep ruang publik menurut Jürgen Habermas. 1.
- Simanungkalit, D. J. (2014). Kajian filosofis atas teori diskursus Jürgen Habermas. <http://repository.ukwms.ac.id/id/eprint/25/>
- Sudrajat, A. (2019). *Jürgen Habermas Jurnas*, 1–7.
- Tobing, M. M. (2017). Jürgen Habermas dan ruang publik di Indonesia. *Jurnal FISIP Universitas Kristen Indonesia*, 1–32. <http://repository.uki.ac.id/>
- Wisnu, R. (2014). Discourse power on Tembang Kinanthi in Serat Wulang Reh by Pakubuwana IV (Jürgen Habermas critical hermeneutics study about discourse power in Tembang Kinanthi Serat Wulang Reh Pakubuwana IV works in a book by Darusuprta). 0–15.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).